

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada era otonomi daerah saat ini, sangat penting untuk mengelola pergerakan pegawai di pusat pemerintahan kabupaten Demak untuk menjamin bahwa pelayanan publik berfungsi dengan baik dan efisien. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Demak dapat terdampak masalah dalam mengelola mobilitas pegawai di berbagai unit kerja yang tersebar di seluruh wilayah administratifnya. Di sini, metode multi sektoral mengacu pada pendekatan yang melibatkan berbagai sektor terkait, seperti perencanaan pembangunan wilayah, transportasi, dan kepegawaian, untuk membuat solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. (Sujarto, 1992) tata ruang sebagai perwujudan yang berkaitan dengan struktur beserta pola pemanfaatan ruang dalam bentuk kehidupan. Dimana unsur-unsur seperti lautan, udara, tanah, dan daya saling terkait dengan aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya.

Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk kepentingan pengendalian, dilakukan monitoring agar didapatkan kesesuaian penggunaan lahan yang baik. (Fauzi Iskandar, M. Awaluddin, 2016).

Dalam membuat perencanaan suatu sistem jaringan transportasi hendaknya dipertimbangkan faktor yang sangat mempengaruhi sistem antara lain karakteristik permintaan, tata guna lahan serta kondisi yang ada di suatu daerah. Faktor yang tidak kurang pentingnya adalah sistem jaringan transportasi pada umumnya dan sistem jaringan jalan raya dan jalan kereta api pada khususnya yang akan diterapkan harus mampu dikembangkan untuk memenuhi permintaan akan jasa transportasi pada masa yang akan datang. Penerapan jaringan jalan raya yang tidak sesuai dengan tata guna

lahan, karakteristik permintaan, kondisi daerah setempat, serta tidak melalui suatu perencanaan yang baik sering menimbulkan masalah yang sulit ditanggulangi terutama jika permintaan akan jasa transportasi sudah melampaui kapasitas sistem yang ada (Ofyar Tamin & Russ Bona Frazila, 2020). Dalam hal ini pergerakan orang dan barang yang di sebut sebagai sistem pergerakan. Pergerakan orang dan barang ini membutuhkan prasarana media yang di sebut sistem jaringan prasarana transportasi (jalan dan rel). Sistem jaringan ini sangat berperan penting dalam mengakomodir pergerakan agar terjadinya pergerakan yang lancar untuk di lalui. Keterkaitan antara sistem kegiatan, sistem pergerakan, dan sistem jaringan yang di atur oleh organisasi kekuasaan (sistem kelembagaan) hal inilah yang di sebut sebagai sistem transportasi makro.

Sistem transportasi adalah suatu bentuk keterkaitan dan keterikatan antara pergerakan orang dan/atau barang (sistem pergerakan) dengan moda angkutannya melalui suatu prasarana jalan (sistem jaringan) karena adanya kebutuhan untuk berpindah dari suatu asal ke tujuan akibat perbedaan tata guna lahan (sistem kegiatan). Transportasi dapat dikatakan kebutuhan turunan (derived demand) dari suatu kegiatan. Sistem transportasi digambarkan sebagai sebuah sistem makro yang meliputi beberapa sistem mikro. Sistem mikro ini terdiri atas sistem kegiatan, sistem pergerakan, dan sistem jaringan yang saling terhubung satu sama lain dan diatur oleh suatu sistem kelembagaan. Sehingga, perubahan pada sistem kegiatan jelas akan berdampak pada sistem pergerakan dan sistem jaringan (Tamin, 2008). Sistem mikro ini terdiri atas sistem kegiatan, sistem pergerakan, dan sistem jaringan yang saling terhubung satu sama lain dan diatur oleh suatu sistem kelembagaan. Pergerakan antar tata guna lahan tidak akan terjadi tanpa adanya sistem jaringan prasarana transportasi yang baik, begitu pula sistem jaringan tidak akan ada artinya tanpa perencanaan tata guna lahan yang baik. Oleh karena itu, perencanaan transportasi harus dilakukan sebaik mungkin dengan mempertimbangkan potensi tata guna lahan (Tamin, 1997) agar dapat memastikan kebutuhan pergerakan terpenuhi (Andriansyah 2015).

Kecamatan Demak adalah ibukota Kabupaten Demak salah satu kabupaten yang ada di provinsi Jawa Tengah, dengan pusat pemerintahannya yang berada di Kecamatan Demak. Kabupaten Demak terletak di bagian utara pulau Jawa dengan luas wilayah 995,32 km² dengan jarak bentangan Utara ke Selatan 41 km Timur ke Barat 49 km dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Wilayah administratif Kabupaten Demak terdiri dari 14 kecamatan, 243 desa, dan 6 kelurahan. Adapun kecamatan yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa adalah kecamatan Sayung, Bonang, dan Wedung (BPS, 2024). Saat ini lokasi kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terletak di Kecamatan Demak adapun jumlah pegawai OPD yang berlokasi di Kecamatan Demak mencapai 1068 pegawai (BPS, 2024). Salah satu cara untuk mengetahui dampak kawasan pusat pemerintahan adalah dengan mengidentifikasi pola pergerakannya yang akan terjadi, dari mana dan ke mana, besarnya, dan kemudian melakukan beban untuk mengetahui kontribusi perjalanannya terhadap volume lalu lintas di jalan yang dilalui. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dampak aktivitas pegawai terhadap lalu lintas untuk merencanakannya dengan benar. Kajian ini akan berfokus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Demak, yang berada di wilayah metropolitan dan terletak ibu kota Kabupaten Demak, sehingga mengakibatkan pola pergerakan di sekitar kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Demak. Kurangnya pilihan aksesibilitas menuju kawasan pusat pemerintahan seperti kurangnya fasilitas untuk pejalan kaki dan sepeda. Keterbatasan transportasi umum yang mana rute transportasi tidak mencakup seluruh area tempat tinggal pegawai diketahui bahwa cakupan pelayanan dari Trayek A,B,C,D,E, dan G dengan jumlah cakupan pelayanan total 85,50 km² dan luas wilayah yang dilayani trayek 995,32 km² dengan jumlah cakupan 8,6%. Pengaturan jam kerja yang tidak fleksibel menyebabkan puncak pergerakan terjadi pada waktu yang sama, yang berkontribusi pada kepadatan lalu lintas, menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa 80% pegawai pemerintahan memulai dan mengakhiri kerja pada jam yang sama, yaitu pukul 08.00-17.00. Dalam penelitian ini,

kawasan pusat pemerintahan termasuk salah satu guna lahan yang banyak menimbulkan arus pergerakan pegawai menuju kawasan tersebut berupa tarikan perjalanan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dampak aktivitas tersebut, diperlukan analisis dari dampak aktivitas tersebut dan pemahaman yang baik tentang perencanaan transportasi yang terkait dengan upaya untuk mengantisipasi masalah tersebut, diantaranya yaitu dengan mengidentifikasi pola pergerakan, karakteristik perjalanan, karakteristik pelaku perjalanan dan pembebanan pada ruas jalan yang dilalui.

Dari penjelasan sebelumnya terkait sistem transportasi bahwa perubahan sistem kegiatan, sistem pergerakan dan sistem jaringan dapat berpengaruh terhadap arus perjalanan. Yang mana, perlu dilakukan kajian terhadap rencana pola pergerakan di kawasan pusat pemerintahan di Kabupaten tersebut. Oleh karena itu, saya selaku penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"POLA PERGERAKAN PEGAWAI PUSAT PEMERINTAHAN DI KABUPATEN DEMAK"**. Kajian ini merupakan tahapan lanjutan dari tahapan bangkitan tarikan (trip generation). Tahapan ini hanya berfokus pada pola pergerakan kondisi saat ini, yaitu tiga tahapan berikutnya: distribusi perjalanan (trip distribution), pemilihan moda (mode choice), dan pembebanan perjalanan (trip assignment). Dengan bantuan software Vissum versi 15.0, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pola pergerakan kawasan pusat pemerintahan di Kabupaten Demak dengan menggunakan simulasi pembebanan sehingga menghasilkan perencanaan transportasi yang berkembang.

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut.

- a. Keterbatasan transportasi umum yang mana rute transportasi tidak mencakup seluruh area tempat tinggal pegawai diketahui bahwa cakupan pelayanan dari Trayek yang ada di Kabupaten Demak dengan jumlah cakupan pelayanan total 85,50 km² dan luas wilayah yang dilayani trayek 995,32 km² dengan jumlah cakupan 8,6%. (Tim Pkl Kabupaten Demak, 2024)

- b. Kurangnya pilihan aksesibilitas menuju kawasan pusat pemerintahan.
- c. Pengaturan jam kerja yang tidak fleksibel menyebabkan puncak pergerakan terjadi pada waktu yang sama, yang berkontribusi pada kepadatan lalu lintas, menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa 80% pegawai pemerintahan memulai dan mengakhiri kerja pada jam yang sama, yaitu pukul 08.00-17.00 (KemenPANRB, 2022)

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana karakteristik perjalanan pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Demak ?
- b. Bagaimana karakteristik pelaku perjalanan pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Demak ?
- c. Bagaimana pola pergerakan pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Demak menuju kawasan pusat pemerintahan ?
- d. Bagaimana pembebanan perjalanan pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Demak ?

I.4 Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan :
 - a. Mengidentifikasi karakteristik perjalanan pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Demak.
 - b. Mengidentifikasi karakteristik pelaku perjalanan pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Demak.
 - c. Mengidentifikasi pola pergerakan pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di sekitar kawasan pusat pemerintahan di Kabupaten Demak.
 - d. Mengidentifikasi pembebanan ruas jalan yang dilalui oleh pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan aplikasi Vissum versi 15.0.
2. Manfaat :

Hasil kajian diharapkan dapat memberikan informasi terkait dampak dari aktivitas pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Demak terhadap volume lalu lintas.

I.5 Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Demak
2. Pola pergerakan yang akan di kaji adalah pola pergerakan kawasan pusat pemerintahan kondisi eksisting di Kabupaten Demak.
3. Objek penelitan adalah pegawai di kantor organisasi perangkat daerah Kabupaten Demak yang berfokus di Kabupaten Demak.
4. Penelitian ini dibatasi pada ruas jalan kajian yang di lalui oleh pegawai
5. Tidak membahas biaya perjalanan.
6. Tidak membahas bangkitan perjalanan dan peramalan.